

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan digital saat ini melejit pesat dengan adanya dampungan dari teknologi-teknologi baru yang bermunculan guna meringankan pekerjaan manusia, atau transformasi digital. transformasi digital adalah sebuah proses evolusi yang bertumpu pada kemampuan yang dimiliki dan teknologi digital untuk menciptakan atau mengubah proses bisnis, proses operasional dan pengalaman pelanggan sehingga menimbulkan nilai yang baru (Hadiono & Noor, 2020) . Perkembangan zaman yang diiringi dengan meningkatnya tuntutan akan kecepatan, efisiensi, dan akurasi dalam dunia kerja telah mendorong pergeseran dari metode manual ke sistem terkomputerisasi. Sistem informasi akuntansi melibatkan banyak hal diantaranya orang sebagai pelaku yang mengerjakan sistem, data, dokumen, seperangkat prosedur dan alat yang digunakan untuk memproses data menjadi suatu informasi (Endraria et al., 2022). Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam kaitannya dengan otomatisasi dan masih dimungkinkan adanya kesalahan input data (Zulfikar et al., 2023).

Rancang bangun mencakup rangkaian aktivitas penggambaran, perencanaan, hingga pembuatan sketsa guna mengintegrasikan berbagai elemen terpisah menjadi satu kesatuan fungsional yang utuh. Tujuannya untuk menghasilkan solusi yang tidak hanya inovatif tetapi juga memenuhi standar keandalan dan efisiensi biaya yang ketat. Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa kedalam bentuk paket

perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau memperbaiki sistem yang sudah ada (Gunawan et al., 2021). Hal ini berfungsi meringankan pekerjaan yang menumpuk dengan waktu terbatas seperti pekerjaan yang bersifat administratif sangat bergantung pada tenaga manusia, yang tidak hanya memakan waktu dan biaya, tetapi juga rentan terhadap kesahan (*human error*). Keterbatasan inilah yang menjadi pendorong utama lahirnya digitalisasi, yaitu sebuah proses transformasi. Kualitas dari suatu produk sistem perangkat lunak, secara langsung ditentukan oleh ketelitian dan tanggung jawab yang diterapkan dalam fase rancang bangun ini dan menjadikannya titik fokus utama untuk mencapai keberhasilan proyek. Menurut (Suhud & Purbaningtyas, 2024) dengan memanfaatkan teknologi guna membantu dalam pekerjaan manusia secara fleksibel dan praktis. Sehingga sumber daya manusia dapat dialihkan ke tugas-tugas yang memerlukan pemikiran kritis, kreativitas, dan pengambilan keputusan yang lebih strategis.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan dan merata menempatkan desa sebagai pilar utama sekaligus subjek pembangunan. Diatur dalam Permendes Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa, serta diatur dalam Keputusan Menteri Desa Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kehadiran BUMDesa memiliki fungsi sebagai lembaga sosial yang menyediakan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan sebagai lembaga komersial yang bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Berdasarkan Peraturan Bupati No 33 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 Kabupaten Tegal sendiri terdapat 268 unit BUMDesa, dengan status BUMDesa Dasar 49 unit, BUMDesa Tumbuh 57 unit, BUMDesa Berkembang 87 unit, dan BUMDesa Maju 8 unit.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, BUMDesa Guyub Rukun ini suatu badan usaha yang dimiliki oleh Desa Tembok Luwung Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Unit usaha yang dijalankan oleh BUMDesa yaitu Penyedia Jasa Pembayaran (Biro Jasa), *Treatment* Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya (Pengelolaan Sampah), dan Lembaga Keuangan Konvensional (Simpan Pinjam). Selain 3 unit tersebut, BUMDesa Guyub Rukun juga mempunyai program Ketahanan Pangan yang wajib melakukan tahap perencanaan hingga tahap pelaporan. Untuk melaksanakan hal tersebut tentunya BUMDesa perlu memiliki pengelolaan yang baik dalam menjalankan usahanya (Pratama, 2024). BUMDesa Guyub Rukun, yang berdiri sejak 2019 di Kabupaten Tegal, menghadapi *urgensi* dalam mengelola program Ketahanan Pangan. Sesuai regulasi terbaru dalam Kepmendes Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, alokasi

minimal 20% dari Dana Desa wajib dikelola untuk swasembada pangan, dimana BUMDesa menjadi instrumen utamanya. Namun, pengamatan awal menunjukkan bahwa pengelolaan dana tersebut di BUMDesa Guyub Rukun masih dilakukan secara manual. Ketidaksiapan infrastruktur manajemen keuangan digital ini beresiko menghambat pelaporan pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal, seperti pemerintah kabupaten.

Kebijakan ketahanan pangan di desa, merujuk pada upaya pencapaian SDGs (*Sustainable Development Goals*) Desa utamanya pada terwujudnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai kebutuhan, Desa Peduli Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, dan Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Ketahanan pangan desa memiliki peranan yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan pangan yang dihasilkan oleh masyarakat desa dengan memaksimalkan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah (*gap*) yang belum terselesaikan oleh peneliti terdahulu. Meskipun penelitian terdahulu telah merancang sistem SI-MANKEU berbasis *Google Workspace* untuk BUMDesa Pelita Mandiri, terdapat keterbatasan fungsionalitas dalam menangani spesifisitas program Ketahanan Pangan yang memiliki alur operasional unik, mulai dari masa tanam hingga pemantauan budidaya. Sebagian besar sistem informasi akuntansi yang ada hanya berfokus pada pelaporan keuangan standar, namun belum mengintegrasikan modul monitoring teknis dan evaluasi riil lapangan secara

terpadu. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk melakukan rancang bangun sistem “PETAPANGAN” berbasis *WordPress* yang dikolaborasi dengan *Google Workspace*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mencoba untuk melakukan penelitian mendalam mengenai “Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Digital Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Studi Kasus Pada BUMDesa Guyub Rukun)”. Penelitian ini tidak hanya bertujuan melakukan digitalisasi, tetapi juga menjembatani kebutuhan antara aspek tata kelola keuangan dengan aspek operasional program ketahanan pangan desa. Dengan pengembangan sistem yang komprehensif ini, diharapkan BUMDesa Guyub Rukun dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dana secara signifikan, memastikan transparansi, dan secara aktif berkontribusi pada kemandirian pangan desa secara berkelanjutan.

1.2. Rumusan Masalah

Ketahanan Pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap masyarakat yang tercermin dari tersediannya pangan yang cukup, baik jumlah mutunya, aman merata, terjangkau, dan berbasis pada keragaman sumber daya local (Rumawas et al., 2021). Sederhananya, ketahanan pangan bukan hanya berarti "tersedia banyak beras", tetapi memastikan bahwa setiap desa mampu mengelola sumber daya untuk lebih mandiri secara berkelanjutan. Program Ketahanan Pangan ini dikelola oleh BUMDesa dengan fasilitas pendampingan dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Peran Dispermades dalam ketahanan pangan berfokus pada aspek

pemberdayaan (manusia dan kelembagaan) serta aspek tata kelola (perencanaan dan penganggaran Dana Desa). Tujuannya adalah menciptakan desa yang mandiri pangan secara berkelanjutan, bukan sekadar memberikan bantuan sesaat. Program ini belum mempunyai sistem pengelolaan keuangan secara digital guna meringankan proses yang berjalan saat ini. Berdasarkan latar belakang yang mendasari bahwa rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana rancangan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dana ketahanan pangan di BUMDesa Guyup Rukun diterapkan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, bahwa tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu dapat mengembangkan sistem tata kelola keuangan operasional program ketahanan pangan desa dengan menghasilkan sistem pengelolaan keuangan berbasis digital dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan dana ketahahn pangan di BUMDesa Guyub Rukun.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka permasalahan penelitian dibatasi hanya pada sistem dan kualitas pengelolaan keuangan program ketahanan pangan berbasis digital dengan menyesuaikan ruang lingkup dan sumber daya manusia pada BUMDesa Guyup Rukun.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini secara teoritis adalah sebagai bentuk pengembangan ilmu akuntansi terutama di bidang sistem pengelolaan keuangan. Di samping itu, akhir penelitian ini dapat menjadi bahan referensi terkait bidang sistem pengelolaan keuangan.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Pengelolaan keuangan yang tersistem akan memudahkan pekerjaan bagi staf pemerintahan dalam mengelola keuangan.
2. Penelitian ini menawarkan solusi bagi pengguna berupa format digital untuk mengelola keuangan, yang akan mempermudah dalam pencatatan dan pelaporan yang dibutuhkan.